



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2604B2GTA	07-2026	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 0940074297443000
A.2 NAMA : ATHKA SAWARGI
A.3 NOMOR IDENTITAS : 0940074297443000000000 - ATHKA SAWARGI
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

- B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 22

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
22-900-01	Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMN/ Badan Usaha Tertentu	68.400.000	1.5	1.026.000

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Potongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 02 Juli 2026
B.9 Nomor Dokumen : 201
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan : Mekanisme Uang Persediaan
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 1000000002399987
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 1000000002399987000000 - UOBK RSUD MALANGBONG
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : UOBK RSUD MALANGBONG
C.4 TANGGAL : 02 Juli 2026
C.5 NAMA PENANDATANGAN : EKA WIDIANING ASTUTI
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Potongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Potongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Potongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.